

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang membutuhkan dana domestik yang cukup besar guna membiayai pembangunan. Sekarang ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada dua masalah pokok. Pertama, kewajiban terhadap hutang luar negeri (*foreign debt service*); dan kedua, penyediaan lapangan kerja untuk menampung pertambahan tenaga kerja setiap tahunnya. Guna menangani kedua masalah tersebut memerlukan dana yang cukup besar, sehingga bangsa Indonesia dituntut untuk lebih cerdas dalam usaha meningkatkan pembentukan permodalannya (Budiono, 2001:15).

Upaya mendatangkan modal asing untuk menutupi kekurangan tabungan domestik, sangat diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dapat dicapai. Hal ini mengingat keadaan perekonomian negara Indonesia yang masih belum stabil. Kondisi keamanan di Indonesia masih dirasakan belum nyaman oleh para investor baik asing maupun lokal guna melakukan investasi.

Salah satu jenis modal asing yang masuk ke Indonesia adalah berupa pinjaman luar negeri baik yang mengalir ke sektor pemerintah maupun swasta nasional. Penggunaan pinjaman luar negeri mempunyai fungsi sebagai pelengkap dana domestik yang masih belum memadai untuk membiayai seluruh proses pembangunan di Indonesia. Namun demikian, penggunaan pinjaman luar negeri yang semakin besar porsinya dalam pembiayaan pembangunan, telah

menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara/lembaga donor, menimbulkan beban hutang yang semakin berat, dan turut andil pada terjadinya krisis nilai tukar dan krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkokoh pondasi bagi proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, adalah mengurangi ketergantungan dari arus modal asing (terutama arus modal jangka pendek) dan pinjaman luar negeri, yang telah menjadi salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia. Dalam kaitan dengan hal ini, maka usaha mobilisasi dana domestik merupakan masalah yang sangat penting, agar penggunaan modal asing serta pinjaman luar negeri dapat dikurangi.

Institusi yang mempunyai peranan penting dalam menghimpun dana masyarakat adalah lembaga perbankan. Masyarakat menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak dikonsumsi untuk menabung. Tabungan inilah yang akan dihimpun oleh pihak bank sebagai dana pihak ketiga (DPK). Dimana tabungan ini hanya akan terjadi jika perkembangan ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan memungkinkan setiap rakyat Indonesia mempunyai kemampuan menabung.

Perkembangan dana perbankan menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi selama tahun 1989-1990, yaitu 45% di tahun 1989 dan 53% di tahun 1990. Tahun 2002 meskipun pertumbuhannya hanya 4%, dana perbankan juga mengalami peningkatan dari Rp. 809.126 miliar ditahun 2001 menjadi Rp. 845.015 miliar tahun 2002. Posisi tabungan terus mengalami kenaikan, akhir tahun 1989 sebesar Rp. 5.213 miliar meningkat menjadi Rp. 9.661 miliar pada akhir tahun 1990, pada

tahun 1991 meningkat lagi mencapai Rp. 15.553 miliar, peningkatan ini terus berlanjut sehingga pada tahun 2002 mencapai Rp. 193.468 miliar. Demikian pula dengan posisi deposito berjangka, pada tahun 1989 sebesar Rp. 34.013 miliar, tahun 1990 mencapai Rp 54.241 miliar, pada akhir tahun 1991 mencapai Rp. 57.552 miliar dan tahun 2002 telah mencapai Rp 447.480 miliar

Tabel 1.1
Posisi Dana Simpanan pada Bank Umum Menurut Kelompok Bank
1986-2002 (Miliar Rupiah)

Akhir Periode	Bank-bank Persero	Bank-bank Swasta Nasional	Bank-bank Pemerintah Daerah	Bank-bank Asing dan Campuran	Bank Umum
1986	15.193	5.435	797	2.086	23.511
1987	18.111	8.040	954	2.226	29.331
1988	22.527	11.167	1.300	2.516	37.510
1989	29.731	19.655	1.674	3.315	54.375
1990	40.638	33.951	2.549	6.016	83.154
1991	41.813	43.142	3.228	6.935	95.118
1992	52.600	51.079	3.697	7.474	114.850
1993	61.683	67.541	4.773	8.682	142.679
1994	64.283	88.925	6.183	11.015	170.406
1995	75.920	117.451	7.812	13.581	214.764
1996	90.434	164.979	8.522	17.783	281.718
1997	133.042	177.193	8.796	38.583	357.614
1998	271.554	235.605	10.932	55.433	573.524
1999	286.427	252.880	14.017	72.294	625.618
2000	328.457	279.037	19.896	92.989	720.379
2001	369.328	305.455	37.088	97.255	809.126
2002	376.845	338.590	45.937	83.643	845.015

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

Semenjak dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah disektor moneter yang diawali dengan deregulasi 1 Juni 1983, mulai ada perubahan yang cukup mendasar pada industri perbankan di Indonesia. Perbankan yang semula banyak

dicampurtangani pemerintah, sedikit demi sedikit mulai dikurangi. Kebijaksanaan yang berupa penetapan suku bunga, pengalokasian dana masyarakat, perkreditan, maupun penciptaan produk-produk perbankan kecuali yang mendapatkan prioritas mulai diserahkan kepada masyarakat perbankan sendiri. Sehingga perbankan yang biasanya bersifat pasif, dan hanya menunggu nasabah, kini harus aktif mencari nasabah dengan berbagai cara yang bisa menarik masyarakat menjadi nasabah.

Hasil dari kebijakan pemerintah tersebut cukup menggembirakan sebagaimana terlihat dari meningkatnya dana deposito/tabungan masyarakat secara pesat, walaupun beberapa kesukaran masih tetap membayangi kemantapan ekonomi kita umumnya. Kebijakan deregulasi membuat industri perbankan dan perekonomian lebih berwawasan global disebabkan oleh *eksport oriented economy*, makin berperannya PMA, sistem devisa bebas, dan komunikasi canggih sehingga Indonesia lebih terbuka terhadap pengaruh pasar finansial global.

Guna mendorong perkembangan perbankan, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan berupa "Paket 27 Oktober 1988". Isi dari Pakto 88 ini antara lain memberikan kemudahan untuk mendirikan bank baru baik bank swasta nasional, campuran, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR); pembukaan kantor cabang baru; dan peningkatan status sebagai bank devisa. Pakto 88 memiliki tujuan memperluas jaringan perbankan dan meningkatkan keanekaragaman pelayanan untuk menggali sumber dana masyarakat dalam lingkup yang lebih luas agar dapat mempercepat tercapainya pembentukan permodalan bangsa Indonesia, lebih menyetatkan sistem perbankan di Indonesia untuk menjamin keamanan dana masyarakat secara preventif dan bukan protektif, memberi

kesempatan yang sama sekaligus meningkatkan daya saing dan kemampuan perbankan Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Pakto ini perbankan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jumlah bank yang pada tahun 1988 masih sekitar 112 unit dengan 1.728 kantor, dalam setahun pada 1990 meningkat menjadi 171 unit bank dengan 3.563 kantor. Bahkan Bank Perkreditan Rakyat dalam waktu yang sama pertumbuhannya dari 3704 BPR menjadi 8.050 BPR atau meningkat lebih 20 kali lipat. Hingga tahun 2002 kini telah berdiri 145 bank dengan kantor sebanyak 6.886 kantor.

Paket 27 Oktober 1988 diharapkan dapat membuat perbankan nasional menjadi semakin profesional mandiri dan tentunya lebih dewasa. Tidak lagi banyak bergantung pada Bank Sentral seperti masa sebelumnya. Namun karena pertumbuhannya sangat pesat menyebabkan persaingan juga semakin tajam, maka dalam membutuhkan tenaga profesional masih banyak bank melakukan pembajakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, penghimpunan dana yang berupa simpanan masyarakat yang salah satunya adalah dilakukan oleh Bank Umum. Bentuk simpanan masyarakat tersebut dapat berupa; giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Dari berbagai jenis simpanan masyarakat di bank, yang paling besar porsinya adalah deposito berjangka. Proporsi yang dominan dari deposito berjangka dalam penghimpunan dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia

terjadi sejak tahun 1983 yaitu sebesar 47,3% dari total dana masyarakat yang dihimpun oleh bank umum, dan pada tahun 1986 telah naik menjadi 50,2%. Serta pada tahun 2000 sekalipun menurun masih tetap dominan yaitu sebesar 39,67%. Deposito berjangka pada bank umum pada tahun 2000 telah mencapai Rp. 390.543 miliar, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 447.480 miliar di tahun 2002.

Tabel 1.2
Posisi Simpanan Berjangka pada Bank Umum menurut Kelompok Bank 1986-2002 (Miliar Rupiah)

Akhir Periode	Bank Persero	Bank Swasta Nasional	Bank Pemerintah Daerah	Bank Asing dan Campuran	Bank Umum
1986	8.742	3.754	165	1.307	13.968
1987	11.327	5.950	206	1.424	18.907
1988	14.601	8.396	261	1.728	24.986
1989	18.446	13.047	379	2.141	34.013
1990	26.903	22.740	516	4.080	54.241
1991	24.181	27.665	696	5.010	57.552
1992	30.610	28.868	882	5.259	65.619
1993	33.132	34.850	1.068	5.660	74.710
1994	31.253	51.610	1.061	7.066	90.990
1995	39.577	73.949	1.376	8.530	123.432
1996	47.133	103.512	1.862	10.154	162.661
1997	79.851	105.134	2.345	20.065	206.395
1998	204.024	166.943	4.045	31.786	406.798
1999	193.493	147.955	3.601	42.022	387.071
2000	185.842	148.722	4.192	51.787	390.543
2001	220.958	161.048	7.040	57.152	446.198
2002	212.539	178.595	11.030	45.316	447.480

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

Sementara itu, berdasarkan pemilikan sahamnya, bank umum di Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu bank umum pemerintah, bank pemerintah daerah, bank umum swasta nasional, dan bank umum swasta asing. Keempat jenis bank

umum tersebut, hanya bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional yang memiliki peranan dominan dalam penghimpunan deposito berjangka masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penghimpunan deposito berjangka oleh bank umum, pertama-tama sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dalam menyimpan, dimana kemampuan menyimpan ini akan tercermin dari tingkat pendapatan nasional.

Sebelum masyarakat memutuskan untuk menyimpan dananya pada lembaga perbankan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat bunga, total aktiva bank dan jumlah kantor bank umum. Tingkat bunga merupakan komponen tingkat bunga riil, sedangkan total aktiva bank menunjukkan ukuran bank (*bank size*) yang dipandang oleh penyimpan sebagai salah satu faktor yang menentukan kredibilitas bank. Dan akhirnya, keberhasilan lembaga perbankan dalam menghimpun deposito berjangka masyarakat juga sangat bergantung pada kemampuan lembaga perbankan dalam menjangkau lokasi penabung dan memberikan pelayanan kepada penabung yang tercermin dari jumlah kantor bank yang ada.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dinyatakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia?
2. Apakah tingkat suku bunga deposito mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia?
3. Apakah total aktiva bank mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia?
4. Apakah jumlah kantor bank mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia?
5. Apakah deposito berjangka periode yang lalu mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan nasional terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh total aktiva bank terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor bank terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.

5. Untuk menganalisis pengaruh deposito berjangka periode yang lalu terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pembandingan bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.
2. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan penghimpunan deposito berjangka bagi pihak yang berkepentingan.

1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.
2. Diduga tingkat suku bunga deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.
3. Diduga total aktiva bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.
4. Diduga jumlah kantor bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.

5. Diduga deposito berjangka periode yang lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito berjangka bank umum di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi antara lain Bank Indonesia (BI) dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Adapun data yang digunakan adalah:

- a. Data deposito berjangka bank umum di Indonesia tahun 1986-2002.
- b. Data pendapatan nasional (Pendapatan Nasional Bruto) di Indonesia tahun 1986-2002.
- c. Data tingkat bunga deposito berjangka bank umum di Indonesia tahun 1986-2002.
- d. Data total aktiva bank umum di Indonesia tahun 1986-2002.
- e. Data jumlah kantor bank umum di Indonesia tahun 1986-2002.

1.6.2. Definisi Variabel

- a. Deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Jangka waktu jatuh tempo dapat dipilih sesuai kebutuhan, yaitu 1

bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan (Thomas Suyatno dkk., 1996).

- b. Pendapatan Nasional adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) yang dinyatakan dalam harga konstan 1993.
- c. Tingkat Bunga adalah tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan pemodal atau tingkat keuntungan yang diharapkan pemodal dari investasi dalam bentuk simpanan. Tingkat bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bunga deposito 3 bulan yang berlaku pada bank umum.
- d. Total Aktiva adalah jumlah semua aktiva yang dimiliki oleh bank umum.
- e. Jumlah Kantor Bank adalah jumlah semua kantor bank umum di seluruh Indonesia.

1.6.3. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan terhadap variabel tidak bebas (deposito berjangka pada bank umum di Indonesia), peneliti menggunakan model penyesuaian parsial (*Partial Adjustment Models*). Pemilihan penggunaan PAM dalam penelitian ini adalah alasan psikologis, di mana masyarakat tidak segera mengubah kebiasaan menandatangani uang mereka mengikuti perubahan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Alasan penggunaan PAM dalam jangka pendek karena deposito berjangka tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat deposito berjangka tahun sekarang tetapi juga dipengaruhi oleh deposito berjangka tahun lalu.

Model dasar dari persamaan estimasi OLS akan dikembangkan menjadi model dinamis dan menaksir model variabel dependen berdasarkan *model penyesuaian parsial* (PAM). Sehingga dalam penelitian ini akan diketengahkan model OLS sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Pemilihan model linear berikut berdasarkan hasil regresi yang lebih baik dibandingkan dengan model nonlinear.

Persamaan estimasi OLS yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + U$$

Variabel-variabel X_1, X_2, X_3, X_4 adalah variabel bebas (*independent variabel*) sedangkan variabel tidak bebas (*dependent variabel*) yang digunakan adalah Y .

Berkaitan dengan penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh, model dasar dari persamaan estimasi OLS akan dikembangkan menjadi model dinamis dan menaksir model deposito berjangka berdasarkan *model penyesuaian parsial* (PAM). Model ini sudah lebih dari dua dekade digunakan dengan sukses untuk analisis ekonomi.

Sebagaimana diketahui, di dalam model PAM dimasukan unsur kelembaman (lag) dari variabel dependennya (deposito berjangka) sehingga diperoleh model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5Y_{(t-1)} + U$$

Dimana:

- Y adalah deposito berjangka di Indonesia (miliar rupiah).
- X₁ adalah pendapatan nasional/PNB (miliar rupiah).
- X₂ adalah total aktiva bank umum (miliar rupiah).
- X₄ adalah jumlah kantor bank umum.
- Y_(t-1) adalah deposito berjangka periode yang lalu (miliar rupiah).
- a adalah konstanta.
- b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ adalah koefisien regresi.
- U adalah kesalahan pengganggu (*error term*).

1.6.4. Uji Statistik

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka perlu dilakukan uji statistik berupa uji t, uji F dan Koefisien Dterminasi R² (*Goodness of Fit*).

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui kemampuan dari masinh-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan/tetap.

Langkah langkah pengujiannya sebagai berikut:

- Ho : b₁ = 0
- Ha : b₁ >0
- Nilai t tabel
- t tabel: t α ; n-k

Dimana :

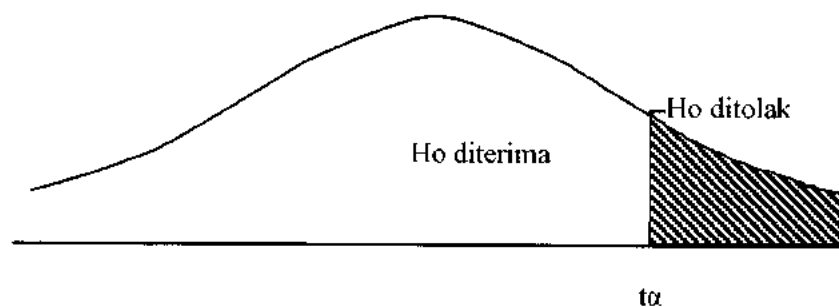
α adalah derajat signifikansi.

n adalah jumlah sampel (observasi).

k adalah banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta.

- Daerah Kritis

Gambar 1.1
Kurva Uji t



- Nilai t hitung

$$t \text{ hitung} = \frac{b_1}{Se(b_1)}$$

Dimana :

b_1 adalah koeffisien regresi.

$Se(b_1)$ adalah standar error koeffisien regresi.

- Kriteria pengujian :

- Apabila nilai t hitung < t tabel, maka Ho diterima. Artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
- Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. Artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0$

- Nilai F tabel

F tabel : $F_{\alpha ; n-k ; k-1}$

Dimana :

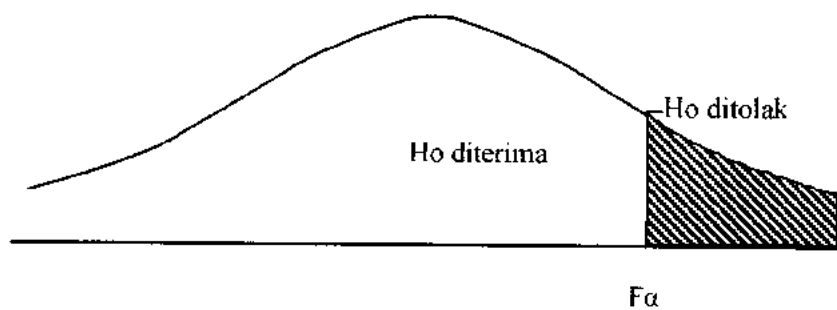
α adalah derajat signifikansi.

n adalah jumlah observasi.

k adalah banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta.

- Daerah Kritis

Gambar 1.2
Kurva Uji F



- Nilai F hitung :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / N - K}$$

Dimana :

R^2 adalah koefisien determinasi.

N adalah jumlah sampel (observasi).

K adalah banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta.

- Kriteria pengujian :

- Apabila nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikansi (5%).

- Apabila nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikansi (5%).

c. Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness of Fit*)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

d. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

- Autokorelasi

Yaitu suatu fenomena bahwa faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan metode uji lagrange multiplier (LM Test), yaitu dengan membandingkan nilai χ^2 tabel dengan χ^2 hitung. Rumus untuk mencari χ^2 hitung sebagai berikut :

$$\chi^2 = (n-1) \cdot R^2$$

Dengan pedoman : bila nilai χ^2 hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel maka tidak ada autokorelasi, sebaliknya bila nilai χ^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel maka ditemukan adanya autokorelasi.

- Heteroskedastisitas

Yaitu suatu fenomena dimana estimator regresi tidak bias, namun varian tidak efisien (semakin besar sampel, semakin besar varian). Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji White. Uji White ini hampir sama dengan uji Park dan uji Glejser. Uji White ini dilakukan dengan membandingkan χ^2 hitung dengan χ^2 tabel, apabila χ^2 hitung $>$ χ^2 tabel maka berarti hipotesis yang mengatakan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas diterima, dan sebaliknya apabila χ^2 hitung $<$ χ^2 tabel maka hipotesis yang mengatakan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas ditolak yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model empiris yang sedang diestimasi.

- Multikolinieritas

Pada mulanya multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Untuk regresi k-variabel, meliputi variabel yang menjelaskan $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ (di mana $X_1 = 1$ untuk semua pengamatan memungkinkan unsur intersep).

Suatu hubungan linear yang pasti ada apabila kondisi berikut ini dipenuhi :

$$b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k + U_1 = 0$$

Di mana U_1 adalah kesalahan stokastik.

Untuk menguji adanya multikolinearitas, karena multikolinearitas adalah kombinasi linear yang pasti atau mendeteksi pasti dari variabel yang menjelaskan lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X yang satu dengan variabel X yang lain adalah dengan meregresi tiap X_i sisa variabel X dan menghitung r^2 yang cocok. Pengujian terhadap masing-masing variabel independen tersebut didapat, kemudian dibandingkan dengan R^2 yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen. Jika didapat r^2 variabel yang melebihi R^2 pada model regresi, maka dari model regresi tersebut terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila R^2 regresi lebih besar daripada r^2 variabel, maka tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi yang diuji. Secara formulasi adalah sebagai berikut :

$$r^2_{X_i, X_j} < R^2_{X_i}$$

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Menguraikan tentang kajian pustaka atau telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang mendasari pemikiran dan sebagai bahan acuan dalam penyusunan penulisan penelitian.

BAB III LANDASAN TEORI

Menguraikan landasan teori tulisan, hubungan teoritis antar variabel, dan teori regresi.

BAB IV DEPOSITO BERJANGKA DI INDONESIA

Membahas tentang sejarah singkat perbankan Indonesia, dan perkembangan deposito berjangka di Indonesia.

BAB V ANALISIS DATA

Menguraikan tentang diskripsi data dan analisis hasil regresi.

BAB VI SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berisi uraian mengenai kesimpulan dan implikasi yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

U Tun wai (1972) melakukan penelitian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi simpanan nasional (*national saving*). Salah satu tujuan penting dari penelitian yang dilakukan oleh U Tun Wai adalah untuk menambah determinasi baru dari simpanan nasional, yaitu lembaga perantara keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel 15 negara maju dan 35 negara berkembang. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui variasi variabel terikat (*national saving*) yaitu: pendapatan masyarakat, tingkat bunga riil, capital inflows, lembaga perantara keuangan, dan variabel dummy (*time dummy* dan *regional dummy*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap simpanan nasional. Tingkat keyakinan lebih besar apabila diterapkan di negara berkembang daripada di negara maju. Lembaga perantara keuangan juga mempunyai pengaruh positif terhadap simpanan nasional (*national saving*). *Capital inflows* mempunyai pengaruh negatif terhadap simpanan nasional apabila diterapkan di negara berkembang, tetapi apabila diterapkan di negara maju akan mempunyai pengaruh yang positif. Tingkat bunga riil mempunyai pengaruh yang positif terhadap simpanan nasional.

Penelitian lain tentang variabel-variabel yang mempengaruhi simpanan nasional dilakukan oleh Shigeyuki Abe. Penelitian tentang simpanan domestik (*domestic saving*) oleh Shigeyuki Abe dilakukan terhadap enam negara Asia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah produk domestik bruto, suku bunga

deposito, pengharapan tingkat laju inflasi, dan pertumbuhan simpanan valuta asing. Kesimpulan dari penelitian Abe adalah bahwa suku bunga deposito dan produk domestik bruto mempunyai pengaruh positif terhadap simpanan domestik (Shigeyuki Abe, et al., 1977: 288).

Danoesapetro, et al. (1990) melakukan penelitian mengenai "Peranan dan prospek bank perkreditan rakyat dalam rangka kebijaksanaan Pakto 1988". Dengan meneliti jumlah bank perkreditan rakyat, perkembangan dana yang dihimpun dan perkembangan pinjaman yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat di Indonesia disimpulkan bahwa kebijaksanaan Pakto 1988 mempermudah prosedur pembentukan bank-bank sampai pada tingkat kecamatan. Dampak dari kondisi tersebut adalah bertambahnya jumlah kantor bank perkreditan rakyat, yang selanjutnya menyebabkan peningkatan jumlah dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan.

Penelitian Sumaryati (1992) mengenai "Analisis efisiensi pengelolaan dana perbankan di Indonesia". Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 (PAKTO 88) terhadap efisiensi pengelolaan dana perbankan khususnya bank swasta devisa. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu secara makro dan secara mikro. Secara makro dengan melakukan estimasi fungsi deposito, fungsi kredit, dan fungsi pendapatan. Sedangkan secara mikro dengan menganalisis beberapa rasio efisiensi usaha pada masing-masing bank yang bersangkutan. Kesimpulan dari penelitian Sumaryati adalah terdapat pengaruh positif yang bermakna dari tingkat suku

bunga deposito, jumlah tenaga kerja, pengeluaran lain-lain, serta jumlah aktiva terhadap jumlah deposito yang berhasil dihimpun oleh bank.

Penelitian Kusdianto (1994), yang meneliti pengaruh beberapa faktor terhadap dana deposito dan kredit bank-bank umum devisa di Indonesia, sebelum dan sesudah Pakto 1988. Dalam penelitian ini digunakan variable bebas: suku bunga deposito, biaya promosi, dan total aktiva. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa suku bunga deposito, biaya promosi, dan total aktiva mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito bank baik sebelum maupun sesudah Pakto 1988.

Edy Suandi Hamid (1999) dalam penelitiannya "Analisis PAM dalam permintaan deposito di Indonesia". Data yang digunakan dalam bentuk data kuartalan dari tahun 1984 sampai tahun 1995. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat bunga nominal, *Reserve Requirement* (giro wajib minimum), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dan tingkat deposito tahun lalu. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah variable tingkat bunga nominal, *Reserve Requirement* (giro wajib minimum), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dan tingkat deposito tahun lalu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan deposito di Indonesia (Edy Suandi Hamid, 1999: 19).

Wahyu Setianingsih (2001) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi deposito berjangka rupiah pada bank pemerintah. Variabel yang digunakan adalah PDB riil per kapita, tingkat suku bunga deposito, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Alat analisi yang digunakan adalah PAM.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa PDB riil per kapita, tingkat suku bunga, dan tingkat deposito periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito berjangka rupiah.

Budiono (2001) dalam penelitiannya “Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito berjangka pada bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional di Indonesia”. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 1984-1996. Variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan nasional, tingkat bunga deposito bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional, total aktiva bank, tingkat inflasi dan jumlah kantor bank. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel pendapatan nasional dan total aktiva bank berpengaruh signifikan terhadap permintaan deposito. Sedang variabel tingkat bunga deposito, tingkat inflasi, dan jumlah kantor bank tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka pada bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional (Budiono, 2001:19).

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Landasan Teori Tulisan

3.1.1. Deposito Berjangka

Sumber dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika bank mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biaya yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi. Ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu: simpanan giro, tabungan, dan deposito (Martono, 2003:39).

Simpanan deposito dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Martono, 2003 :40). Berbeda dengan tabungan dan giro, simpanan deposito mengandung

unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan hanya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang diberikan relatif lebih tinggi dibanding dengan tabungan dan giro. Bunga disesuaikan dengan perkembangan pasar dan biasa diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Untuk mencairkan deposito maka pemilik deposito (deposan) dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya ada tiga jenis deposito yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 hingga 24 bulan. Bila jangka waktu yang telah ditentukan habis maka deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga

Penetapan suku bunga untuk setiap jangka waktu ditetapkan masing-masing bank sesuai dengan perhitungan kondisi bunga di pasar. Jika diperhitungkan bunga yang akan datang cenderung menurun, maka penetapan bunga untuk jangka waktu yang lebih panjang lebih rendah. Sebaliknya jika diperhitungkan bunga pasar yang akan datang cenderung meningkat, maka penetapan bunga untuk jangka waktu yang lebih panjang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menempatkan depositonya dengan waktu yang paling panjang, dengan demikian bila terjadi kenaikan bunga deposito, maka bank akan tetap memelihara deposito tersebut dengan bunga seperti pada saat

pembukuan (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2003:193-194). Bunga deposito berjangka dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo (tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan) atau tanggal jatuh tempo pokok (tanggal berakhirnya jangka waktu penyimpanan).

Jenis deposito kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan ijin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga (Thomas Suyatno dkk, 1993: 38).

Pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, perbedaannya hanyalah bahwa sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk dalam bentuk sertifikat, sedangkan deposito berjangka dikeluarkan atas nama. Jadi, sertifikat deposito yang ditunjukkan harus dibayar oleh bank yang menerbitkannya. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli, baik tunai maupun nontunai. Selain itu bunga juga dapat dicairkan setiap bulan atau jatuh tempo.

Sebagai catatan tambahan, perlu diperhatikan bahwa bank umum, bank pembangunan, ataupun Bank Perkreditan Rakyat, dapat menyelenggarakan deposito berjangka, artinya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka. Tetapi untuk menerbitkan sertifikat deposito, hanya Bank Umum dan Bank Pembangunan yang diperbolehkan. Itupun harus memperoleh ijin Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan tertentu.

antara lain dari segi kesehatan dan kemampuan bank dari segi kebutuhan permodalannya (Thomas Suyatno, 1993:39).

Deposit on call yang merupakan jenis deposito ketiga hanya digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp 25 juta dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan *deposit on call* memiliki jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari dan paling lama kurang dari satu bulan. *Deposit on call* diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call*. Apabila depositan ingin mencairkan depositonya sebelum *deposit on call* tersebut dicairkan sesuai dengan jangka waktunya, tiga hari sebelumnya depositan terlebih dahulu harus sudah memberitahukan kepada pihak bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan *deposit on call*-nya.

Pada dasarnya deposito tidak dapat ditarik atau dicairkan depositan sebelum deposito yang bersangkutan tersebut jatuh tempo. Bila hal ini terpaksa dilakukan, maka penabung dikenakan denda atau biasa disebut dengan *penalty*. Denda atau *penalty* yang dikenakan yaitu sebesar selisih antara bunga yang diperoleh selama deposito belum jatuh tempo dengan bunga yang berlaku sesuai dengan lamanya deposito mengendap. Disamping dikenakan *penalty*, nasabah juga dikenai biaya administrasi, tergantung dari besarnya nilai nominal deposito yang bersangkutan.

3.1.2. Produk Nasional Bruto (PNB)

Ukuran paling komprehensif dari aktivitas ekonomi keseluruhan negara adalah nilai total produksi barang dan jasa suatu negara, yaitu disebut produk nasional. Salah satu ide paling penting dalam makro ekonomi adalah bahwa

produk nasional sama dengan pendapatan nasional. Untuk negara sebagai keseluruhan, semua nilai yang dihasilkan akhirnya harus menjadi milik seseorang sebagai klaim atas nilai itu. Jadi, produk nasional sama dengan klaim pendapatan total yang dihasilkan oleh produksi barang dan jasa.

Pendapatan nasional terbagi atas pendapatan nasional harga berlaku dan pendapatan nasional harga tetap. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah cara yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Bolehlah diramalkan bahwa apabila dibandingkan data pendapatan nasional dalam berbagai tahun tersebut, nilainya akan berbeda-beda dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pertambahan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu (i) pertambahan fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian (ii) kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya (Sadono Sukirno, 1994:35).

Pertumbuhan sesuatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan nasional yang didapat dalam

penghitungan ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil.

Pendapatan nasional riil memberitahukan bahwasannya nilai keluaran sekarang diukur pada harga konstan – jumlah kuantitas yang dihargai pada harga berlaku pada periode dasar tertentu. Pendapatan nasional merupakan ukuran penting kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Nasional Bruto (PNB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PNB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diwujudkan oleh warga negara sesuatu negara selama periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Nilai barang dan jasa yang dihitung dalam Pendapatan Nasional Bruto hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung. Baik faktor-faktor produksi tersebut dimiliki warga negara sesuatu negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri.

Ada tiga pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional yaitu pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*), pendekatan produksi (*Production Approach*), dan pendekatan pendapatan (*Income Approach*).

Di negara-negara yang perekonomiannya sudah sangat maju seperti negeri Belanda, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah cara yang paling penting. Hal ini disebabkan karena cara tersebut dapat memberikan keterangan-keterangan yang

sangat berguna mengenai tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati.

Dengan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran dari berbagai golongan masyarakat ke atas barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi dalam perekonomian tersebut. Barang-barang dan jasa-jasa yang diimpor tidak dimasukkan dalam penghitungan ini. Begitu juga barang-barang produksi dalam negeri yang akan diproses kembali oleh perusahaan-perusahaan lain untuk dijadikan barang-barang lain, tidak turut dihitung untuk menentukan besarnya pendapatan nasional. Barang-barang yang masih akan diproses lagi, nilainya tidak turut dihitung di dalam penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari berlakunya penghitungan dua kali (Sadono Sukirno, 1994:36).

Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekonomi kepada 4 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran pemerintah (G), pembentukan modal sektor swasta atau investasi (I), dan ekspor neto (X-M).

Sehingga pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GNP} = \text{C} + \text{G} + \text{I} + (\text{X}-\text{M})$$

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan produksi. Pendekatan untuk ini adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Penggunaan pendekatan ini dalam menghitung pendapatan nasional mempunyai dua tujuan penting: (i) untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional, (ii) sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan dua kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produk terakhir yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi (Sadono Sukirno, 1994:41).

Pendekatan ketiga adalah pendekatan pendapatan. Seperti kita ketahui faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan: tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan. Apabila faktor-faktor produksi itu digunakan dalam proses produksi mereka akan memperoleh pendapatan, yaitu tanah memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga, dan keahlian kewirausahaan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional yang dinamakan pendapatan nasional neto menurut harga faktor.

Dalam perhitungan pendapatan nasional yang sebenarnya, penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi tidak selalu mengikuti penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi seperti yang dinyatakan di atas. Dengan perkataan lain, pendapatan nasional tidak ditentukan dengan menghitung dan

menjumlahkan seluruh gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima seluruh faktor-faktor produksi dalam suatu tahun tertentu. Hal ini dikarenakan dalam perekonomian terdapat banyak kegiatan di mana pendapatannya merupakan gabungan dari gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan.

Contoh dari kegiatan yang demikian adalah perusahaan-perusahaan perseorangan. Untuk suatu perusahaan perseorangan, yang dimaksud "keuntungan usaha" adalah gabungan dari gaji dan upah, bunga, sewa, dan keuntungan sebenarnya dari usaha yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan usaha-usaha perseorangan pendapatannya bersifat seperti yang baru saja dijelaskan. Oleh karenanya, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi secara berikut:

1. Pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah.
2. Pendapatan dari usaha perseorangan (perusahaan perseorangan).
3. Pendapatan dari sewa.
4. Bunga neto – yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga ke atas pinjaman konsumsi dan bunga ke atas pinjaman pemerintah.
5. Keuntungan perusahaan.

Yang dinyatakan dalam (2) mencerminkan jumlah gaji dan upah, bunga, sewa, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh pemiliknya sendiri dan keluarganya.

Sehingga pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GNP} = \text{Gaji} + \text{Bunga} + \text{Sewa} + \text{Keuntungan}$$

3.1.3. Tingkat Bunga

Pengertian dasar dari tingkat bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai “harga” ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi “pertukaran” antara *satu rupiah sekarang* dan *satu rupiah nanti* (misalnya setahun lagi). Hutang-piutang timbul karena terjadi “pertukaran” semacam ini. “Pembeli” dari *satu rupiah sekarang* dan sekaligus juga “penjual” dari *satu rupiah nanti* adalah peminjam (debitur), sedangkan “penjual” dari *satu rupiah sekarang* yang sekaligus juga “pembeli” *satu rupiah nanti*, adalah orang yang meminjamkan (kreditur). Debitur harus membayar kepada kreditur “harga” dari pertukaran tersebut, dan harga ini adalah bunga yang dibayar debitur dan yang diterima kreditur (Boediono, 1998:75-76).

3.1.3.1. Teori Klasik

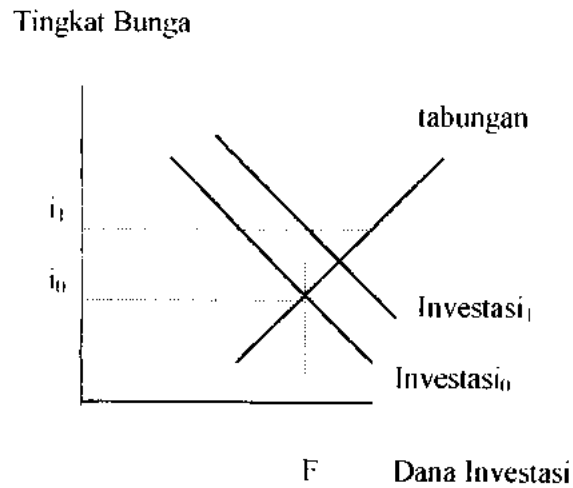
Bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *loanable funds*. Secara bebas *loanable funds* diterjemahkan sebagai dana investasi atau dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Menurut teori Klasik bunga adalah “harga” yang terjadi di “pasar” dana investasi (Boediono, 1998:36).

Tabungan, menurut teori Klasik merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan seseorang atau masyarakat untuk menabung uangnya di bank. Artinya, pada tingkat bunga yang

lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengurangi atau mengorbankan pengeluaran konsumsinya guna menambah tabungannya.

Investasi juga tergantung/merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus ia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil.

Tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan untuk naik atau turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Hal ini tercapai pada saat penabung dan investor (dalam hal ini pengusaha) bertemu di pasar *loanable fund* (dana investasi) untuk melakukan tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat bunga kesepakatan (keseimbangan). Secara grafik keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan seperti dalam gambar 3.1.



Gambar 3.1.

Keseimbangan tingkat bunga terjadi pada titik i_0 , dimana jumlah tabungan sama dengan investasinya. Apabila tingkat bunga diatas i_0 maka jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para penabung akan saling bersaing untuk meminjamkan dananya dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun kembali ke posisi i_0 . Sebaliknya, apabila tingkat bunga di bawah ini, para pengusaha akan saling bersaing untuk memperoleh dana yang jumlahnya relatif lebih kecil. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke i_0 .

Kenaikan efisiensi produksi misalnya, akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan naik. Sehingga, pada tingkat bunga yang sama pengusaha bersedia meminjam dana lebih besar untuk meminjam dana lebih besar untuk membiayai investasinya. Atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya, pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan ini

ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan investasi ke kanan atas, dan keseimbangan tingkat bunga yang baru pada i_1 .

3.1.3.2. Teori Irving Fisher

Dalam perekonomian dikenal konsep tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga riil. Anggaplah seseorang menyetorkan uangnya dalam rekening bank dengan bunga 8 persen per tahun. Pada tahun berikutnya, orang tersebut memiliki uang 8 persen lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tetapi ketika harga meningkat, sehingga uang membeli lebih sedikit, maka daya beli orang tersebut tidak meningkat sebesar 8 persen. Jika tingkat inflasi adalah 5 persen, maka jumlah barang yang dapat dibeli hanya meningkat 3 persen. Apabila tingkat inflasi adalah 10 persen, maka daya beli orang tersebut secara nyata turun sampai 2 persen.

Para ekonom menyebut tingkat bunga yang dibayar bank sebagai tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*) dan kenaikan dalam daya beli orang tadi sebagai tingkat bunga riil. Tingkat bunga nominal seringkali disertai dengan terjadinya inflasi tinggi. Jika i menyatakan tingkat bunga nominal, r tingkat bunga riil, dan π tingkat inflasi, maka hubungan dari ketiga variabel ini bisa ditulis sebagai berikut:

$$r = i - \pi$$

Tingkat suku bunga riil sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi.

Bila diatur kembali persamaan tingkat bunga riil di atas, akan didapatkan bahwa tingkat bunga nominal adalah jumlah tingkat bunga riil dan tingkat inflasi.

$$i = r + \pi$$

Persamaan Fisher menunjukkan bahwa bunga bisa berubah karena dua alasan: karena tingkat bunga riil berubah atau karena tingkat inflasi berubah (N. Gregory Mankiw, 2003:86).

Irving Fisher berpendapat bahwa bunga adalah premi yang harus dibayarkan pada pemilik dana agar ia mau meminjamkan uangnya. Fisher menyatakan bahwa ada hubungan positif antara suku bunga nominal dengan inflasi. Dalam jangka panjang, tingkat bunga riil tidak dipengaruhi oleh laju inflasi.

Makna dari dalil tersebut adalah bahwa apabila fluktuasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun diabaikan, maka kecenderungan umumnya adalah bahwa tingkat bunga nominal akan naik atau turun searah dan bersama-sama dengan naik turunnya laju inflasi. Apabila laju inflasi meningkat maka tingkat bunga nominal juga meningkat, dan sebaliknya apabila laju inflasi turun. Tetapi ingat bahwa hubungan ini berlaku untuk jangka panjang (atau untuk tren-nya), sedangkan dari tahun ke tahun (apalagi dari bulan ke bulan) ada kemungkinan laju inflasi naik tetapi tingkat bunga nominal tetap (Boediono, 1998:92).

3.1.3.3. Teori Keynesian: *Liquidity Preference*

Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Ada tiga motif (transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi) mengapa orang menghendaki memegang uang tunai. Tiga motif inilah yang menyebabkan

timbulnya “permintaan akan uang”, yang diberi nama *liquidity preference*. Nama ini mempunyai makna tertentu, yaitu bahwa permintaan akan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap *likuid* untuk memenuhi tiga motif tersebut. Memegang uang tunai (atau “rupiah sekarang”) menjamin likuiditas pada orang tersebut. Preferensi atau keinginan untuk tetap likuid (oleh sebab itu diberi nama “*liquidity preference*”) inilah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan uang. Teori Keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi: permintaan besar apabila tingkat bunga rendah, dan permintaan kecil apabila tingkat bunga tinggi. Untuk berspekulasi di pasar surat berharga orang perlu memegang uang tunai, dan karena kegiatan spekulasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan maka orang bersedia membayar harga tertentu untuk pemegangan uang tunai untuk tujuan tersebut. Kemungkinan keuntungan itu sendiri timbul karena adanya ketidakpastian mengenai perkembangan tingkat bunga (atau harga obligasi) di masa depan. Hanya dalam suasana ketidakpastianlah orang bisa “berspekulasi” (Boediono, 1998:82-83).

3.1.3.4. Sintesis Klasik dan Keynesian: IS-LM (Sir John Hicks)

Terdapat perbedaan mendasar antara mashab Klasik dan mashab Keynesian mengenai mengapa ada “bunga”. Mashab Klasik menekankan bahwa bunga timbul karena uang adalah “produktif”, dalam arti bahwa dengan dana di tangan seorang pengusaha bisa menambah alat produksinya (modal) yang bisa

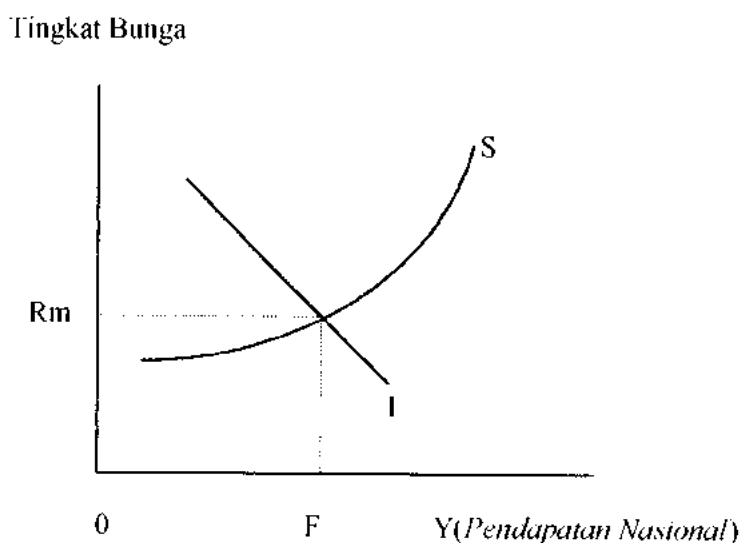
menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan lain perkataan, uang bisa meningkatkan produktivitas, dan karena kenaikan produktivitas inilah orang mau membayar bunga

Menurut mashab Keynesian, uang bisa “produktif” dengan cara lain. Dengan uang tunai di tangan orang bisa berspekulasi di pasar surat berharga dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Dan karena adanya kemungkinan keuntungan ini orang mau membayar bunga (Boediono, 1998:84-85).

Kedua pandangan di atas sebenarnya saling melengkapi. Kaum Klasik memandang uang sebagai “dana investasi” (*loanable funds*) yang langsung dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan produksi barang dan jasa. Kaum Keynesian lebih menekankan sifat uang sebagai suatu “aktiva yang likuid” yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh keuntungan dari pasar surat berharga. Uang sebenarnya adalah dua-duanya, yaitu sebagai aktiva likuid dan sekaligus juga sebagai dana investasi.

Sir John Hicks ekonom terkemuka Inggris, menekankan bahwa suatu tingkat bunga bisa dikatakan benar-benar merupakan tingkat bunga keseimbangan atau *equilibrium interest rate* bagi suatu perekonomian apabila tingkat bunga tersebut memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi (*loanable funds*) dan sekaligus keseimbangan di pasar uang (sebagai aktiva/asset likuid). Alat analisisnya adalah kurva IS-LM. Hicks menyatakan bahwa tabungan tidak hanya ditentukan oleh tingkat bunga, tetapi juga oleh tingkat pendapatan (*marginal propensity to save*): tabungan akan naik apabila pendapatan naik. Pendapatan nasional naik apabila investasi naik, dan investasi cenderung naik apabila tingkat

bunga turun. Dari interaksi ini dapat diturunkan kurva IS, yang menunjukkan tingkat bunga keseimbangan di pasar dana investasi (*loanable funds*) pada setiap tingkat pendapatan nasional (Y). Sedangkan kurva LM menunjukkan tingkat bunga keseimbangan di pasar uang (sebagai aktiva) pada setiap tingkat pendapatan nasional.



Gambar 3.2.

Tingkat bunga yang sesungguhnya, menurut Hicks, adalah tingkat bunga yang merupakan tingkat bunga keseimbangan di pasar investasi dan sekaligus merupakan tingkat bunga keseimbangan di pasar uang.

3.1.3.5. Teori Kelompok Pasar (*The Preferred Market Habit Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa tingkat bunga yang berlaku bagi suatu "kelompok" pinjaman dengan jangka waktu tertentu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dana untuk kelompok tersebut. Apabila karena sesuatu hal permintaan akan dana untuk jangka waktu 1 bulan meningkat, maka tingkat

bunga untuk “kelompok” pinjaman dengan jangka waktu 1 bulan tersebut cenderung akan meningkat. Tingkat bunga untuk kelompok ini mungkin akan menjadi lebih tinggi daripada tingkat bunga untuk kelompok 3 bulan, 6 bulan atau kelompok lainnya. Masing-masing “kelompok” seakan-akan mempunyai “pasar” sendiri, dan situasi pasar masing-masing kelompok yang terutama menentukan tingkat bunga untuk kelompok tersebut.

Teori ini *tidak* mengatakan bahwa tingkat bunga untuk suatu kelompok *hanya* dipengaruhi oleh situasi kelompok tersebut, yaitu bahwa masing-masing pasar tidak berhubungan dengan pasar lain. Teori ini mengakui adanya hubungan antar pasar-pasar tersebut. Hubungan tersebut ada dan sifatnya mirip dengan hubungan antara suatu pasar barang (misal, pasar beras) dengan pasar barang lainnya (misalnya, pasar jagung atau pasar tepung terigu). Hubungan jauh atau dekat antara pasar-pasar tersebut tergantung pada apakah barang-barang tersebut satu sama lainnya mempunyai hubungan *substitusi* yang dekat atau tidak. Apabila misalnya dana 1 bulan mempunyai hubungan substitusi yang lebih dekat dengan dana 2 bulan daripada dengan dana 1 tahun, maka keadaan “pasar” dana 2 bulan akan mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada keadaan “pasar” dana 1 tahun terhadap tingkat bunga untuk dana 1 bulan, meskipun (menurut teori ini) keadaan “pasar” dana 1 bulan itu sendiri yang *paling* menentukan tingkat bunga untuk dana 1 bulan.

Teori struktur tingkat bunga ini bersumber pada teori Klasik. Teori ini menekankan:

1. Peranan “harapan masyarakat” atau *expectation* mengenai pola perkembangan tingkat bunga di masa mendatang dalam menentukan struktur tingkat bunga, dan
2. Bahwa walaupun ada pasar “kelompok” seperti yang digambarkan oleh teori kelompok pasar, tetapi antara kelompok satu dengan yang lain *sangat* menentukan situasi pasar lain (dengan kata lain, substitusi antara satu kelompok dana dengan kelompok dana lain sangat dekat).

3.1.4. Aktiva Bank

Aktiva menunjukkan hak atau milik perusahaan. Dalam pengertian modal perusahaan, maka aktiva menggambarkan rupa modal (alat-alat) yang dipakai. Dengan kata lain aktiva menunjukkan hak atau milik dan rupa modal.

Dalam susunan aktiva terlihat hak-hak perusahaan, misalnya hak milik berupa: uang, gedung, mesin-mesin, barang-barang, hak menagih atau piutang (misalnya pinjaman-pinjaman yang telah dikeluarkan, penjualan barang yang belum dibayar, hak mengambil uang di bank, dan sebagainya).

Rupa modal itu sebenarnya mewujudkan daya beli, artinya memberi kekuatan pada perusahaan untuk bergerak, beraksi, membeli, tukar-menukar dan sebagainya. Aktiva merupakan daya beli yang terikat pemakaiannya. Oleh karena itu aktiva dinamai juga rupa modal, alat-alat atau daya beli perusahaan.

Sifat aktiva ditentukan oleh faktor kemungkinan penggunaan (merealisasikan) daya beli yang melekat pada aktiva itu. Lain halnya dengan

penentuan sifat modal. Sifat modal ditentukan pula dari rupa modal di aktiva, tetapi pertimbangannya dititikberatkan pada peran atau fungsi bagian-bagian aktiva dalam jalannya (proses) usaha produksi.

Macam-macam Aktiva:

3.1.4.1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar biasa juga disebut *current assets* atau *ciculating assets* atau juga *working capital assets*. Yang termasuk dalam aktiva lancar adalah uang tunai dan aktiva-aktiva lain yang dalam "normal business operation" jangka waktu kurang dari satu tahun pada umumnya dapat berubah bentuk menjadi uang tunai.

Aktiva-aktiva perusahaan yang tergolong aktiva lancar:

1. Uang tunai (*cash*)
2. Investasi sementara (*temporary investment*)
3. Piutang niaga (*account receivable*)
4. Wesel tagih (*notes receivable*)
5. Persediaan (*inventory*)
6. Uang muka (*prepaid expenses*)

3.1.4.2. Aktiva Tetap

Aktiva yang tergolong dalam kategori aktiva tetap antara lain sebagai berikut:

1. Tanah (*land*) yaitu lokasi tanpa bangunan dan tanpa *improvements*.
2. Bangunan (*building*) yaitu gedung-gedung yang didirikan di atas atau melekat pada tanah.

3. *Land improvements*, yaitu segala sesuatu yang dibangun di atas atau melekat pada tanah dan bukan bangunan rumah. Misalnya: jalan, kolam, lapangan tenis dan lain sebagainya.
4. *Equipment*, kadang-kadang digunakan juga istilah *machines and equipment*. Ini meliputi berbagai mesin-mesin kantor, barang-barang investasi, alat-alat kerja atau *tools*, dan perabot rumah tangga.

3.1.4.3. Aktiva Tak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aktiva perusahaan yang dapat digolongkan sebagai *intangible assets* atau aktiva tak berwujud adalah:

1. Hak paten, yaitu hak monopoli atas pemanfaatan suatu penemuan baru atau invention atas permintaan investor, pemerintah dapat mengeluarkan hak paten.
2. *Trade mark*, yaitu tanda yang dipakai sebagai tanda atau identitas hasil produksi suatu perusahaan.
3. Hak cipta atau *copyright*, yaitu hak monopoli untuk menerbitkan hasil tulisan atau hasil karya seni pencipta.
4. *Franchise*, yaitu hak istimewa yang diberikan perusahaan oleh perusahaan.
5. *Leasehold*, yaitu kontrak jangka panjang untuk dapat memanfaatkan benda-benda tidak bergerak milik orang lain.
6. *Leasehold improvement*, yaitu biaya-biaya perbaikan atau biaya bangunan di atas tanah yang disewakan oleh perusahaan.
7. *Goodwill*, adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang normal.

8. *Organisation cost* atau biaya organisasi, yaitu seluruh pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai pendirian perusahaan.

3.1.4.4. *Miscellaneous Assets* atau aktiva lain-lain

Tergolong dalam kategori ini adalah semua *noncurrent assets* yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu di antara keempat kategori di atas, antara lain:

1. Tanah yang belum terpakai oleh perusahaan.
2. *Sinking fund*, yaitu dana yang disisihkan perusahaan untuk maksud-maksud tertentu.
3. Saldo bank di luar negeri yang merupakan *frozen credit*, dalam keadaan-keadaan tertentu dapat terjadi pemerintah membekukan rekening bank milik orang asing.

3.1.5. Jumlah Kantor Bank

Kini bukan hanya tingkat bunga yang tinggi serta banyaknya hadiah yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih bank. Jumlah kantor bank menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank. Apalagi melihat mobilitas masyarakat yang semakin cepat dan terus berkembang, mereka memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis. Banyaknya kantor yang dimiliki bank yang tersebar luas akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Keterjangkauan kantor tentunya akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan. Jumlah kantor bank yang banyak dan mudah ditemukan memberikan penilaian lebih masyarakat terhadap bank yang bersangkutan.

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan bank dalam memjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak kantor yang ada, semakin banyak masyarakat yang menyimpan dananya, sehingga semakin banyak simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank.

3.2. Hubungan Teoritis Variabel Dependen dengan Variabel Independen

3.2.1. Hubungan Pendapatan Nasional dan Simpanan

Simpanan adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi. Menurut Keynes simpanan (*saving*) merupakan fungsi dari pendapatan. Simpanan (*saving*) terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional. Tidak semua pendapatan yang diterima seseorang akan digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian akan disimpan sebagai simpanan (*saving*). Bila tingkat pendapatan rendah, rumah tangga tidak bisa menabung atau hanya sedikit menabung karena ia harus membelanjakan semua atau sebagian besar pendapatannya untuk memelihara tingkat kehidupan tertentu. Pada tingkat pendapatan lebih tinggi, konsumsi dan tabungan akan lebih besar. Semakin besar pendapatan semakin besar pula simpanan yang dilakukan masyarakat. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian ada hubungan positif antara pendapatan nasional dan simpanan.

3.2.2. Hubungan Tingkat Bunga dan Simpanan

Hubungan antara tingkat bunga dan simpanan bersifat positif. Naiknya tingkat bunga akan meningkatkan permintaan untuk menabung. Seorang menanamkan uangnya dalam bentuk simpanan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkat bunga yang lebih tinggi. Bila

tingkat bunga lebih rendah daripada keuntungan yang diharapkan, seseorang akan memilih menginvestasikan uangnya daripada menyimpan uangnya di bank. Semakin besar tingkat bunga akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, sehingga jumlah simpanan masyarakat pada bank akan naik.

3.2.3. Hubungan Total Aktiva Bank dan Simpanan

Semakin besar total aktiva yang dimiliki oleh bank mencerminkan semakin besarnya kemampuan bank tersebut dalam memberikan pelayanannya kepada para nasabah, sehingga akan meningkatkan jumlah dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh lembaga perbankan. Total aktiva memiliki hubungan positif dengan simpanan.

3.2.4. Hubungan Jumlah Kantor Bank dan Simpanan

Keberhasilan lembaga perbankan dalam menghimpun dana masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan lembaga perbankan dalam menjangkau penabung atau calon penabung baru dan melayaninya, yang tercermin oleh tersedianya kantor bank yang ada. Semakin banyak jumlah kantor bank yang ada, akan berpengaruh kepada semakin banyaknya penabung yang menyimpan kelebihan dananya di bank, sehingga semakin besar simpanan masyarakat yang bisa dihimpun oleh lembaga perbankan. Berarti ada pengaruh positif antara jumlah kantor bank dan simpanan yang dapat dihimpun oleh bank.

3.3. Model Penyesuaian Parsial (PAM)

Model harapan adaptif adalah suatu cara untuk merasionalisasikan model Koyck. Rasionalisasi lain diberikan oleh Nerlove dalam apa yang disebut model penyesuaian stok atau penyesuaian parsial. Untuk menggambarkan model ini, perhatikan model percepatan fleksibel (*flexible accelerator*) dari teori ekonomi yang mengasumsikan bahwa ada jumlah keseimbangan, optimal, diinginkan, atau jangka panjang yang diperlukan untuk memproduksi hasil (output) tertentu dalam keadaan teknologi tertentu, tingkat bunga tertentu, dan seterusnya. Untuk penyederhanaan diasumsikan bahwa tingkat modal yang diinginkan ini Y_t^* merupakan fungsi linear dari hasil X sebagai berikut :

$$Y_t^* = b_0 + b_1 X_t + e_t \quad (1)$$

Karena tingkat modal yang diinginkan tidak bisa diamati secara langsung, Nerlove mendalilkan hipotesis berikut ini, yang dikenal sebagai hipotesis *penyesuaian parsial* atau *penyesuaian stok* :

$$Y_t - Y_{t-1} = \delta(Y_t^* - Y_{t-1}) \quad (2)$$

Di mana δ , sedemikian rupa sehingga $0 < \delta \leq 1$, dikenal sebagai koefisien penyesuaian (*coefisien of adjustment*) dan di mana $Y_t - Y_{t-1}$ merupakan perubahan yang sebenarnya dan $(Y_t^* - Y_{t-1})$ perubahan yang diinginkan.

Kadang-kadang model tadi juga ditulis sebagai berikut :

$$Y_t - Y_{t-1} = \delta(Y_{t-1}^* - Y_{t-1})$$

Persamaan (3) mendalilkan bahwa perubahan sebenarnya dalam stok modal (investasi) dalam suatu periode waktu tertentu t adalah suatu fraksi δ dari perubahan yang diinginkan untuk periode itu. Jika $\delta = 1$, ini berarti bahwa stok

modal yang sebenarnya sama dengan stok yang diharapkan: yaitu stok yang sebenarnya menyesuaikan diri dengan stok yang diharapkan secara seketika (dalam periode waktu yang sama). Tetapi, jika $\delta=0$ ini berarti bahwa tidak ada perubahan apapun karena stok yang sebenarnya pada saat t sama seperti yang diamati dalam periode waktu sebelumnya. Khususnya, δ diharapkan untuk terletak antara kedua ekstrim ini karena penyesuaian terhadap stok modal yang diharapkan nampaknya akan tidak sempurna karena kekakuan (*rigidity*), kelembaman, kewajiban yang bersifat kontrak, dan seterusnya. Itulah sebabnya dinamakan *model penyesuaian parsial*. Perhatikan bahwa mekanisme penyesuaian (2) secara alternatif dapat ditulis sebagai

$$Y_t = \delta Y_t^* + (1-\delta)Y_{t-1} \quad (3)$$

Yang menunjukkan bahwa stok modal yang diamati pada periode t adalah rata-rata tertimbang dari stok modal yang diinginkan pada saat itu dan stok modal yang ada dalam periode waktu sebelumnya, dengan $\delta(1-\delta)$ sebagai bobotnya. Sekarang dengan mensubstitusikan (1) ke dalam (3), memberikan

$$Y_t = \delta(b_0 + b_1 X_t + e_t) + (1-\delta)Y_{t-1} = \delta b_0 + \delta b_1 X_t + (1-\delta)Y_{t-1} + \delta e_t \quad (4)$$

Model ini disebut *model penyesuaian parsial* (Damodar Gujarati, 1997:242-243).

BAB IV

DEPOSITO BERJANGKA DI INDONESIA

4.1. Sejarah Singkat Perbankan Indonesia

4.1.1. Bank Sentral

Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Bank ini berasal dari *De Javasche Bank* yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1951 dengan UU No.24 Tahun 1951. Melalui UU No. 11 Tahun 1953 (Undang-undang Pokok Perbankan Indonesia 1953), *De Javache Bankwet* 1922 dicabut dan digantikan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral (Thomas Suyatno dkk, 1993:6).

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. KEP.65/UBS/65, bank-bank tersebut di atas menjalankan usaha masing-masing dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV, dan Unit V. BNI Unit I berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum (ibid:6).

Sebagai pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang berbunyi, "Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan

dan Undang-undang Bank Sentral”, maka dikeluarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (berlaku mulai 1 Januari 1968) dan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, menggantikan PP No.17 Tahun 1965.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 1968, BNI Unit I dipisahkan kembali dari bank tunggal dan didirikan sebuah bank sentral di Indonesia dengan nama Bank Indonesia.

Dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1968 ditetapkan. “Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II, III, IV, dan V sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, beralih menjadi hak, kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari bank-bank negara yang masing-masing akan dibentuk dengan undang-undang tersendiri”.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1968, maka bank-bank negara yang dilebur ke dalam Bank Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1968 dipisahkan kembali dan kemudian didirikan bank-bank negara baru, masing-masing dengan undang-undang baru (Thomas Suyatno dkk. 1993:6).

4.1.2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek (UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok

Perbankan). Bank umum terdiri dari bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank umum asing, dan bank umum koperasi (Thomas Suyatno, 1993:7).

Sesuai dengan undang-undang yang baru yaitu UU No. 7 Tahun 1998 tentang Pokok Perbankan dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, bank dikategorikan menjadi dua jenis

1. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4.2. Paket Kebijakan Perbankan

4.2.1. Paket Kebijakan 1 Juni 1983

Sasaran pokok kebijakan 1 juni 1983 adalah meletakkan landasan yang kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan perbankan yang sehat melalui usaha mendorong dana masyarakat dengan cara mengerahkan dan menempatkan dana perbankan tersebut ke sektor riil.

Melalui kebijakan 1 Juni 1983, otoritas moneter memberikan kebebasan kepada bank-bank pemerintah dalam menentukan suku bunga dana dan suku bunga kredit. Sejalan dengan kebijakan tersebut pemerintah melakukan tindakan pengurangan penyediaan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

4.2.2. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988

Deregulasi berikutnya dikenal dengan Pakto 1988. Otoritas moneter melalui Pakto ini menetapkan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan:

1. Pengerahan dana masyarakat

Dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk pembukaan kantor cabang bank dan LKBB (Lembaga Keuangan Bukab Bank), penerbitan sertifikat deposito, dan perluasan tabungan.

2. Peningkatan ekspor nonmigas

Upaya meningkatkan ekspor nonmigas melalui sektor perbankan antara lain dengan cara perluasan bank devisa, pendirian bank campuran, kemudahan pendirian kantor cabang bank asing seraya penyempurnaan mekanisme SWAP dan mendorong aktivitas para pedagang valuta asing.

3. Peningkatan efisiensi

Dilakukan dengan cara penempatan dana BUMN dan BUMD nonbank pada bank swasta dan LKBB dan menambah jumlah kantor cabang serta menetapkan batas maksimum pemberian kredit.

4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter

Kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan upaya pengendalian atas kebijakan moneter tersebut antara lain dengan cara menurunkan likuiditas wajib minimum dari 5 % menjadi 2 % dan memberi peluang operasi pasar terbuka.

5. Pengembangan pasar modal

Melalui pengenaan pajak atas bunga deposito, simpanan, dan tabungan serta meningkatkan peran serta bank dan LKBB dalam menunjang pasar modal.

4.2.3. Paket Kebijakan Desember 1989

Pokok kebijaksanaan yang ditempuh terutama berkaitan dengan pelaksanaan teknis Pakto 1988.

4.2.4. Paket Kebijakan Januari 1990

Perkembangan KLBI tampaknya dari kurun waktu tersebut meningkat dalam jumlah yang besar dan mengarah pada efek infentor dan kurang mendorong niat bank-bank untuk memobilisasi dana masyarakat. Tingkat kemacetan kredit tinggi karena banyak para pclaku perbankan yang belum menyadari latar belakang penyediaan fasilitas KI.BI tersebut.

Paket kebijaksanaan Januari 1990 melakukan penghapusan KLBI kecuali untuk bank-bank tertentu disertai dengan ketentuan dan penetapan 20 % dari jumlah kredit yang disalurkan dan dikhususkan bagi usaha kecil.

4.2.5. Paket Kebijakan 28 Februari 1991

Guna mendorong pertumbuhan perbankan nasional ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional, pemerintah menetapkan langkah-langkah kehati-hatian antara lain: CAR (*Capital Adequensi Ratio*) dan LDR (*Loan Deposit Returns*) harus mengikuti standar Internasional (BIS). Prasyarat kepemilikan dan pengurusan bank diperketat, selaras dengan

pengetatan ketentuan *legal lending limit* serta pembentukan cadangan untuk menutupi resiko

4.2.6. Paket Kebijakan 29 Mei 1993

Perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan kurun waktu 1990 sampai dengan 1992 dirasakan agak tersendat akibat dari keengganan bank untuk melakukan ekspansi penyaluran kredit karena banyaknya kasus kredit bermasalah.

Tujuan dari paket kebijakan 29 Mei 1993 adalah untuk mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan dengan cara memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan melalui langkah-langkah melonggarkan ketentuan CAR, cadangan penghapusan dan penilaian kesehatan, memperluas cakupan LDR serta menyempurnakan ketentuan KUK, serta melakukan pengetatan ketentuan *legal lending limit*.

4.2.7. Ketentuan dan Kebijakan lainnya

Dalam kurun waktu tahun 1994 dan 1995 berbagai kebijakan otoritas moneter dan perbankan diterapkan. Rangkaian-rangkaian kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk menempatkan kedudukan perbankan yang strategis di dalam pembangunan ekonomi nasional agar dapat terselenggara dengan baik dengan cara mengikuti prinsip kehati-hatian seraya menempatkan kedudukan bisnis perbankan untuk mampu berperan serta di dalam perkembangan ekonomi internasional.

1. Penyempurnaan bentuk laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan.
2. Peningkatan modal setor bagi bank-bank devisa.

3. Peningkatan jumlah cadangan wajib likuiditas dari 2 persen menjadi 3 persen.
4. Peningkatan CAR secara bertahap dari 8 persen menjadi 12 persen.
5. Pengetatan batas maksimum penyaluran kredit sebesar 20 persen kepada afiliasi/group bank.
6. Penyelarasan/pagu penyaluran kredit baik secara global dan sektoral bagi bank-bank tertentu.

4.2.8. Program Restrukturisasi Bank Umum

Pada dasarnya program restrukturisasi perbankan ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perbankan. Karena krisis yang berkepanjangan telah menyebabkan bank-bank mengalami masalah-masalah yang berat, bahkan banyak bank yang memiliki modal negatif. Krisis tersebut semakin diperberat dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional yang ditandai dengan menurunnya dana pihak ketiga. Oleh karena itu restrukturisasi perbankan dilakukan untuk menyelesaikan masalah perbankan baik pada sisi aktiva maupun pasiva bank. Dari sisi pasiva, dilakukan langkah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap bank melalui program pinjaman pemerintah baik untuk bank umum maupun BPR.

Selanjutnya untuk memperbaiki struktur permodalan bank, langkah kebijakan dilakukan melalui program rekapitulasi bank umum. Sementara itu disisi aktiva, restrukturisasi dilakukan melalui upaya memperbaiki kualitas aktiva produktif khususnya kredit melalui program restrukturisasi kredit. Langkah-langkah kebijakan tersebut sekaligus dibarengi dengan perbaikan ketentuan

kehati-hatian dan kelembagaan, pelaksanaan *fit and proper test*, dan peningkatan pengawasan perbankan.

4.2.9. Program Rekapitalisasi Bank Umum

Program rekapitalisasi perbankan ditujukan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga memenuhi ketentuan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sekurang-kurangnya 4 persen. Kebijakan rekapitalisasi bank umum adalah sebagai berikut:

1. Semua bank milik pemerintah akan direkapitalisasi dengan dana pemerintah.
2. Semua Bank Pembangunan Daerah yang CAR-nya kurang dari 8 persen akan dikapitalisasi dengan dana pemerintah.
3. Bank Campuran yang CAR-nya kurang dari 4 persen akan direkapitalisasi dengan dana dari pemilik sepanjang partner asing bersedia merekapitalisasi.
4. Bank-bank swasta nasional yang CAR-nya antara -25 persen sampai 4 persen akan direkapitalisasi dengan bantuan dana pemerintah dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

4.3. Perkembangan Deposito Berjangka Bank Umum

Perkembangan deposito berjangka dari tahu ke tahun menunjukkan kenaikan yang mengembirakan. Kenaikan tersebut terlihat setelah dikeluarkannya paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988.

Perkembangan deposito berjangka memperlihatkan perkembangan yang besar. Pada tahun 1986 deposito berjangka telah mencapai Rp 13.968 miliar, hingga tahun 2002 telah mengalami peningkatan sebesar Rp 447.480 miliar. Kenaikan tersebut selain karena menariknya suku bunga yang ditawarkan dan terbanyaknya kantor-kantor bank yang ada, juga disebabkan oleh lebih besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank-bank tersebut.

Terjadinya krisis pada tahun 1997, menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank umum. Hal ini dipicu oleh adanya likuidasi terhadap 42 bank. Likuidasi terhadap beberapa bank menyebabkan masyarakat melakukan penarikan dana secara besar-besaran (*bank runs*).

Tahun 1999 terjadi penurunan deposito yaitu dari Rp 406.798 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 387.071 miliar rupiah. Namun di tahun berikutnya deposito berjangka kembali lagi mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 tercatat jumlah deposito berjangka pada bank umum telah mencapai Rp 447.480 miliar.

Berikut adalah tabel perkembangan deposito berjangka pada bank umum dari tahun 1986-2002

Tabel 4.1
Perkembangan Deposito Berjangka pada Bank Umum di Indonesia
1986-2002 (Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah Deposito	Pertumbuhan (persen)
1986	13.968	-
1987	18.907	35,36
1988	24.986	32,15
1989	34.013	36,13
1990	54.241	59,47
1991	57.552	6,10
1992	65.619	14,02
1993	74.710	13,85
1994	90.990	21,79
1995	123.432	35,65
1996	162.661	31,78
1997	206.395	26,89
1998	406.798	97,10
1999	387.071	-4,85
2000	390.543	0,90
2001	446.198	14,25
2002	447.480	0,29

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

4.4. Perkembangan Pendapatan Nasional

PNB (Produk Nasional Bruto) atau GNP (*Gross National Product*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PNB ini merupakan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara (Indonesia) dalam satu tahun.

Berdasarkan tabel GNP atas harga konstan 1993, setiap tahunnya GNP mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 1997 dan 1998 GNP mengalami pertumbuhan yang negatif, hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia

Perkembangan Pendapatan Nasional Indonesia dapat digambarkan melalui table berikut:

Tabel 4.2
Perkembangan Pendapatan Nasional Indonesia 1986-2002
(Miliar Rupiah)

Tahun	GNP	Pertumbuhan GNP (%)
1986	204.936,00	-
1987	214.424,50	4,63
1988	229.219,80	6,90
1989	246.388,30	7,49
1990	263.639,50	7,00
1991	282.169,10	7,03
1992	299.832,90	6,26
1993	317.223,20	5,80
1994	371.971,30	17,26
1995	441.148,00	18,60
1996	518.295,80	17,49
1997	417.783,00	-19,39
1998	348.409,50	-16,61
1999	357.207,40	2,53
2000	372.543,20	4,29
2001	394.291,90	5,84
2002	404.522,70	2,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

Secara keseluruhan, sejak tahun 1998 keadaan GNP mulai tumbuh kembali. Selama tahun 2002 perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin baik. Pertumbuhan GNP di tahun 2002 mencapai 2,59 % atau sebesar Rp 404.522,7 miliar.

4.5. Perkembangan Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum

Sejak dikeluarkannya deregulasi 1 Juni 1983, pemerintah memberikan kebebasan kepada bank untuk menentukan tingkat suku bunganya masing-masing. Bank beramai-ramai memberikan suku bunga yang menarik agar nasabah mendepositokan uangnya di bank tersebut.

Suku bunga deposito terus terlihat mengalami kenaikan. Namun kemudian pemerintah melakukan upaya penurunan suku bunga secara bertahap melalui pelanggaran kebijakan moneter. Hasilnya tercermin dari mulai menurunnya suku bunga deposito dari 21,89 % pada tahun 1991 menjadi 14,27 % pada tahun 1993. Suku bunga mulai mengalami kenaikan kembali pada tahun 1994 sebesar 14,24 % atau tumbuh sebesar 21,03 %.

Adanya usaha pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan langkah pengetatan moneter yang dilakukan BI, menyebabkan suku bunga deposito mengalami peningkatan. Kenaikan yang sangat tajam terjadi pada tahun 1997. Suku bunga mencapai 23,92 % dan pada tahun 1998 mencapai 49,23 % atau tumbuh sebesar 105,81 %.

Sejalan dengan mulai pulihnya stabilitas moneter dan membaiknya ekspektasi masyarakat akan kestabilan harga dan nilai tukar, suku bunga mulai turun secara bertahap.

Tabel 4.3
Perkembangan Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum di
Indonesia 1986-2002 (%)

Tahun	Suku Bunga 3 Bulan	Pertumbuhan Suku Bunga (%)
1986	14,58	-
1987	17,54	20,30
1988	18,07	3,02
1989	17,27	-4,43
1990	20,99	21,54
1991	21,89	4,29
1992	16,72	-23,62
1993	11,79	-29,49
1994	14,27	21,03
1995	17,15	20,18
1996	17,03	-0,70
1997	23,92	40,46
1998	49,23	105,81
1999	12,95	-73,69
2000	13,24	2,24
2001	17,24	30,21
2002	13,63	-20,94

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

4.6. Perkembangan Total Aktiva Bank Umum

Total aktiva bank mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1986 tercatat total aktiva bank sebesar Rp 40.802 miliar. Sedangkan pada tahun 2002 telah mencapai Rp 1.059.816 miliar. Peningkatan terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa kendala berarti.

Posisi total aktiva perbankan pada tahun 2002 telah mencapai Rp 1.059.816 miliar atau naik 1,91 % dari posisi tahun sebelumnya (2001) yaitu sebesar Rp 1.039.925 miliar. Kenaikan aktiva pada tahun 2002 tak terlepas dari kontribusi peningkatan pos kredit yang mendominasi struktur aktiva perbankan

dengan menguasai 33.36 % total aktiva menggeser dominasi obligasi pemerintah yang pada posisi sebelumnya masih dominan dengan komposisi 35.62 % aktiva perbankan.

Tabel 4.4
Perkembangan Total Aktiva Bank Umum di Indonesia 1986-2002
(Miliar Rupiah)

Tahun	Total Aktiva	Pertumbuhan (persen)
1986	40.802	-
1987	48.202	18,14
1988	63.284	31,29
1989	93.024	46,99
1990	132.623	42,57
1991	153.239	15,54
1992	180.148	17,56
1993	213.959	18,77
1994	248.061	15,94
1995	308.618	24,41
1996	387.477	25,55
1997	528.875	36,49
1998	763.428	44,35
1999	789.356	3,53
2000	984.500	24,72
2001	1.039.925	5,63
2002	1.059.816	1,91

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

4.7. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum

Dampak Pakto 1988 adalah perkembangan perbankan yang tercermin dari perkembangan jumlah bank dan kantor bank. Jumlah kantor bank mengalami peningkatan dari 1.521 kantor tahun 1986 menjadi 6.886 kantor pada tahun 2002. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 1989 dimana pertumbuhan kantor bank mencapai 49,19 % atau sebanyak 2.578 kantor.

Tabel 4.5
Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum di Indonesia
1986-2002

Tahun	Jumlah Kantor Bank	Pertumbuhan (persen)
1986	1.521	-
1987	1.622	6,64
1988	1.728	6,54
1989	2.578	49,19
1990	3.563	38,21
1991	4.247	19,20
1992	4.402	3,65
1993	4.613	4,79
1994	4.888	5,96
1995	5.288	8,18
1996	5.919	11,93
1997	6.308	6,57
1998	7.532	19,40
1999	7.016	-6,85
2000	6.397	-8,82
2001	6.657	4,06
2002	6.886	3,44

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

Hingga akhir 2002, jumlah bank yang masih beroperasi 141 bank, turun sebanyak 4 bank disbanding tahun sebelumnya karena ada merger 5 BUSN pada September 2002 menjadi Bank Permata (terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Ekspres, Bank Arthamedia, dan Bank Patriot). Walaupun jumlah bank mengalami penurunan, namun jumlah kantor bank meningkat dari 6.657 kantor pada tahun 2001 menjadi 6.886 kantor pada 2002.

Dari 141 bank tersebut, pemerintah mempunyai kepemilikan terhadap 37 bank (26,24 %) yang terdiri dari 5 bank BUMN, 3 eks BTO, 3 bank rekap, dan 26 BPD terdiri dari 12 BPD rekap dan 14 BPD nonrekap. Sedangkan sisanya sebanyak 69 bank kategori A dan 1 bank eks BTO yang telah didivestasikan

(49,64 %) dimiliki swasta nasional, 24 bank campuran (17,02 %) dimiliki oleh swasta nasional dan asing, dan sebanyak 10 bank asing (7,09 %) dimiliki oleh pihak asing.

BAB V
ANALISIS DATA

5.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang merupakan data tahunan, yang dimulai dari tahun 1986 sampai tahun 2002. Penelitian mengenai deposito berjangka disini menggunakan data deposito secara keseluruhan pada bank umum di Indonesia sebagai variabel dependen (variabel tidak bebas). Variabel independen terdiri dari pendapatan nasional, suku bunga deposito, total aktiva bank, dan jumlah kantor bank.

Tabel 5.1
Data Observasi

Tahun	Y	X ₁ *	X ₂	X ₃	X ₄
1986	13.968	204.936,00	14,58	40.802	1.521
1987	18.907	214.424,50	17,54	48.202	1.622
1988	24.986	229.219,80	18,07	63.284	1.728
1989	34.013	246.388,30	17,27	93.024	2.578
1990	54.241	263.639,50	20,99	132.623	3.563
1991	57.552	282.169,10	21,89	153.239	4.247
1992	65.619	299.832,90	16,72	180.148	4.402
1993	74.710	317.223,20	11,79	213.959	4.613
1994	90.990	371.971,30	14,27	248.061	4.888
1995	123.432	441.148,00	17,15	308.618	5.288
1996	162.661	518.295,80	17,03	387.477	5.919
1997	206.395	417.783,00	23,92	528.875	6.308
1998	406.798	348.409,50	49,23	763.428	7.532
1999	387.071	357.207,40	12,95	789.356	7.016
2000	390.543	372.543,20	13,24	984.500	6.397
2001	446.198	394.291,90	17,24	1.039.925	6.657
2002	447.480	404.522,70	13,63	1.059.816	6.886

Sumber: BI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dan
*BPS, Statistik Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan

Keterangan:

Y = Deposito berjangka pada Bank Umum (miliar Rp)

X₁ = Pendapatan nasional / PNB (miliar Rp)

X₂ = Tingkat suku bunga deposito (%)

X₃ = Total aktiva Bank Umum (miliar Rp)

X₄ = Jumlah kantor Bank Umum

Variabel pendapatan nasional menggunakan data GNP dan data telah disesuaikan dengan tahun dasar 1993. Data suku bunga deposito yang digunakan adalah data suku bunga 3 bulan. Variabel total aktiva diperoleh dari neraca gabungan bank umum. Dan variabel jumlah kantor bank menggunakan seluruh kantor bank umum tanpa mengikut sertakan BPR.

Keseluruhan dari data yang digunakan sebagai bahan penelitian diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Data mengenai deposito berjangka, suku bunga deposito, total aktiva bank, dan jumlah kantor bank diperoleh dari statistik ekonomi keuangan Indonesia dan laporan tahunan BI dari berbagai edisi terbitan BI. Sedangkan untuk data pendapatan nasional dalam hal ini diwujudkan dalam GNP berdasarkan harga konstan 1993, diperoleh dari statistik Indonesia dari berbagai edisi yang diterbitkan oleh BPS.

5.2. Uji F Statistik

1. Hipotesis

H₀ : $b_1=b_2=b_3=b_4=b_5=0$, artinya secara bersama-sama variabel X₁, X₂, X₃,

X₄, Y₍₋₁₎ tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel X₁, X₂, X₃,

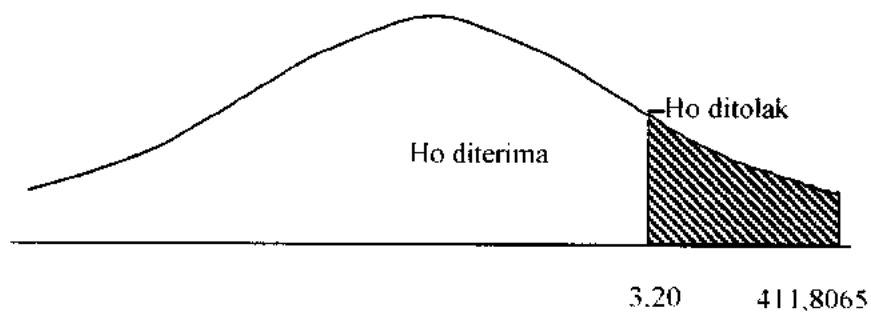
X₄, Y₍₋₁₎ mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$$2. F_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05; k-1; n-k)$$

$$= (\alpha = 0,05; 5; 11) = 3,20$$

$$F_{\text{hitung}} = 411,8065$$

Gambar 5.1
Kurva Uji F



Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi deposito berjangka (variabel dependen) di Indonesia.

5.3. Uji t Statistik

5.3.1. Uji t terhadap Parameter Pendapatan Nasional (b_1)

1. Hipotesis

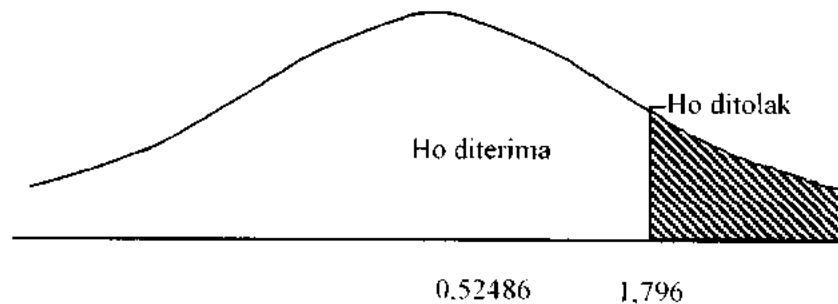
$H_0 : b_1 = 0$, artinya secara individual variabel pendapatan nasional (X_1) tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$H_a : b_1 > 0$, artinya secara individual variabel pendapatan nasional (X_1) mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$$2. t_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05; df = 11) = 1,796$$

$$t_{\text{hitung}} = 0,524860$$

Gambar 5.2
Kurva Uji t terhadap Parameter Pendapatan Nasional (b_1)



Nilai t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara individual variabel pendapatan nasional (X_1) tidak berpengaruh terhadap deposito berjangka (Y) di Indonesia.

5.3.2. Uji t terhadap Parameter Suku Bunga (b_2)

1. Hipotesis

$H_0 : b_2 = 0$, artinya secara individual variabel suku bunga (X_2) tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$H_a : b_2 > 0$, artinya secara individual variabel suku bunga (X_2) mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

2. t tabel ($\alpha = 0,05$; $df = 11$) = 1,796

t hitung = 4,858655

Karena t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara individual variabel suku bunga mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

Gambar 5.3
Kurva Uji t terhadap Parameter Suku Bunga (b_2)



5.3.3. Uji t terhadap Parameter Total Aktiva Bank (b_3)

1. Hipotesis

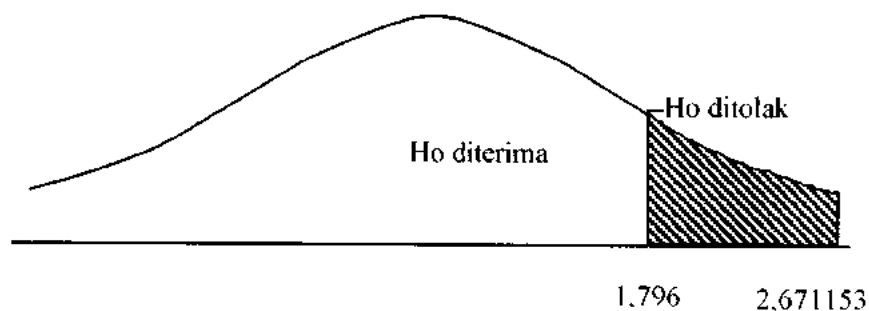
$H_0 : b_3 = 0$, artinya secara individual variabel total aktiva bank (X_3) tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$H_a : b_3 > 0$, artinya secara individual variabel total aktiva bank (X_3) mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

2. $t_{\text{tabel}} (\alpha = 0,05; df = 11) = 1,796$

$t_{\text{hitung}} = 2,671153$

Gambar 5.4
Kurva Uji t terhadap Parameter Total Aktiva Bank (b_3)



Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara individual variabel total aktiva bank mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

5.3.4. Uji t terhadap Parameter Jumlah Kantor Bank (b_4)

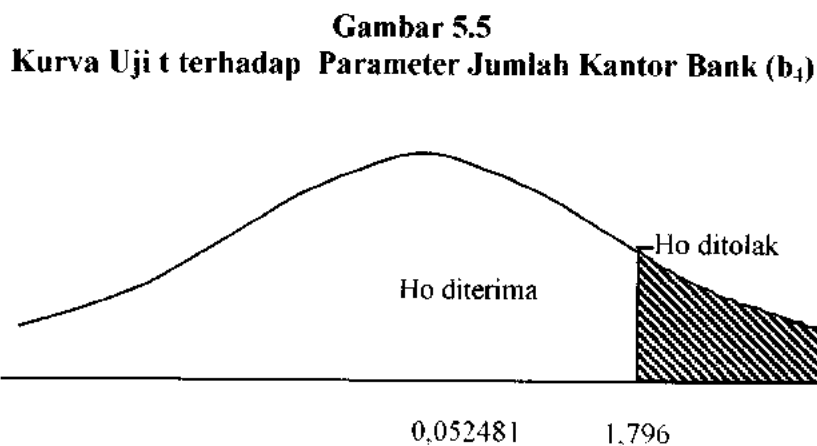
1. Hipotesis

$H_0 : b_4 = 0$, artinya secara individual variabel jumlah kantor bank (X_4) tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$H_a : b_4 > 0$, artinya secara individual variabel jumlah kantor bank (X_4) mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

2. $t_{tabel} = (\alpha = 0,05; df = 11) = 1,796$

$t_{hitung} = 0,052481$



Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara individual variabel jumlah kantor bank tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

5.3.5. Uji t terhadap Parameter Deposito Berjangka Periode yang Lalu (b_5)

1. Hipotesis

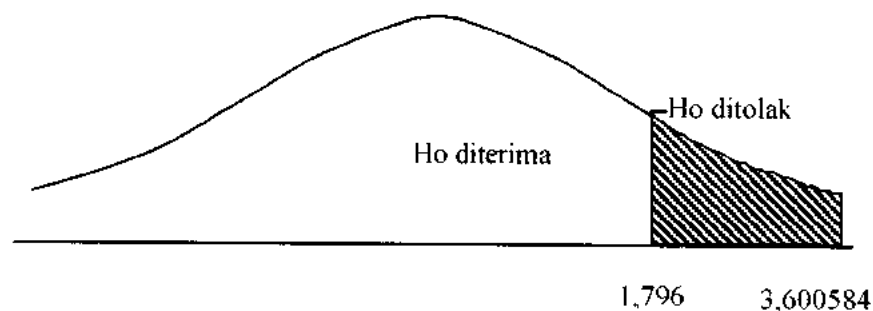
$H_0 : b_5 = 0$, artinya secara individual variabel deposito berjangka periode yang lalu ($Y_{(-1)}$) tidak mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

$H_a : b_5 > 0$, artinya secara individual variabel deposito berjangka periode yang lalu ($Y_{(-1)}$) mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

2. $t_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05; df = 11) = 1,796$

$t_{\text{hitung}} = 3,600584$

Gambar 5.6
Kurva Uji t terhadap Parameter
Deposito Berjangka Periode yang Lalu(b_5)



Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti secara individual variabel deposito berjangka periode yang lalu mempengaruhi deposito berjangka (Y) di Indonesia.

5.4. Goodness of Fit (Koefisien Determinasi R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisi yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil estimasi dihasilkan R^2 sebesar 0,995167. Berarti variasi dari variabel-variabel independen yang dipakai mampu menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 99%, sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang berada di luar model.

5.5. Uji Asumsi Klasik

5.5.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara meregres setiap variabel independennya. Jika nilai r^2 dari setiap variabel independent lebih besar dari nilai R^2 hasil regresi berarti terdapat multikolinearitas. Hasil analisis regresi antara variabel-variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Uji Multikolinearitas

Variabel	r^2 Variabel	R^2 Regresi	Keterangan
X1 terhadap X2	0,000189	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X1 terhadap X3	0,349860	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X1 terhadap X4	0,644537	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X1 terhadap Y(-1)	0,234464	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X2 terhadap X3	0,013025	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X2 terhadap X4	0,072494	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X2 terhadap Y(-1)	0,007579	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X3 terhadap X4	0,728181	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X3 terhadap Y(-1)	0,941316	0,995167	tidak ada multikolinearitas
X4 terhadap Y(-1)	0,615894	0,995167	tidak ada multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2004

5.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui keberadaan heterokedastisitas digunakan uji White. Dengan membandingkan nilai χ^2 lebih kecil daripada χ^2 -tabel, maka hipotesis alternatif adanya *heterokedastisitas* dalam model ditolak. Dengan uji White diperoleh:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistik	0.877699	probability	0.599209
Obs*R-squared	10.19322	probability	0.423709

$$\chi^2 \text{ hitung} = 10,19322$$

$$\chi^2 \text{ tabel} = 19,68$$

Berdasarkan uji White diatas diperoleh hasil menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas dalam madel yang sedang diestimasi, karena nilai χ^2 hitung lebih kecil dibandingkan dengan χ^2 tabel, yaitu $10,19322 < 19,68$.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai t statistik < t tabel berarti tidak terdapat heterokedastisitas.

5.5.3. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan uji LM Test. Dengan uji LM Test diperoleh:

Serial korelasi LM Test: 1 lags

F-statistik	0.803836	probability	0.393298
Obs*R-squared	1.311872	probability	0.252056

Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama (*first order*) tetapi juga digunakan pada tingkat derajat. Jika hasil uji LM berada pada hipotesa nol (H_0) yaitu χ^2 hitung $<$ χ^2 tabel maka model estimasi tidak terdapat autokorelasi, begitu pula sebaliknya jika berada pada hipotesa alternatif (H_a) yaitu χ^2 hitung $>$ χ^2 tabel, maka model estimasi terdapat autokorelasi.

- Diperoleh χ^2 hitung:

$$(n-1) \cdot R^2 = \chi^2 \text{ hitung}$$

$$(17-1) \cdot 0,081992 = 1,311872$$

Dengan membandingkan nilai χ^2 tabel dengan χ^2 hitung, dimana χ^2 hitung $(17-1) \cdot 0,081992 = 1,311872$, sementara nilai χ^2 tabel dengan $\alpha = 5\%$ sebesar 19,68. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji LM maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi diterima. Nilai χ^2 hitung $<$ nilai χ^2 tabel dengan demikian dapat disimpulkan model estimasi berada pada hipotesa nol atau tidak ditemukannya autokorelasi.

5.6. Interpretasi Hasil Analisis

Pengolahan data computer menggunakan program Eviews. Dari penolahan data tersebut diperoleh hasil estimasi model persamaan kuadrat kecil OLS yang dikembangkan menjadi *model penyelesaian parsial* (PAM).. Berdasarkan hasil estimasi data, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Hasil Regresi dengan Eviews

Variabel	Koefisien	Standart Error	t-statistik
C	-83426,96	24901,68	-3,350254
X ₁	0,050744	0,096681	0,52486
X ₂	3960,887	815,223	4,858655
X ₃	0,184948	0,069239	2,671153
X ₄	0,338130	6,442915	0,052481
Y _(t-1)	0,597312	0,165893	3,600584
R ²	0,995167		
DW Stat	2,361907		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2004

5.6.1. Jangka Pendek

Dari hasil analisis data pada tabel di atas diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda jangka pendek sebagai berikut :

$$Y = -83426,96 + 0,050744X_1 + 3960,887X_2 + 0,184948X_3 + 0,33813X_4 + 0,587312Y_{(t-1)}$$

Dalam jangka pendek, koefisien konstanta sebesar 83426,96 berarti jika pendapatan nasional (X_1), tingkat suku bunga deposito (X_2), total aktiva bank (X_3), jumlah kantor bank (X_4), dan deposito berjangka periode yang lalu ($Y_{(t-1)}$) tetap, maka deposito berjangka akan mengalami penurunan sebesar Rp 83426,96 miliar. Nilai koefisien suku bunga (X_2) sebesar 3960,887 berarti apabila suku bunga deposito mengalami peningkatan sebesar 1%, maka deposito berjangka akan mengalami kenaikan sebesar Rp 3960,887 miliar. Kenaikan deposito berjangka yang begitu besar ini dapat dipahami mengingat daya tarik utama dari deposito adalah tingkat suku bunganya yang begitu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga sangat mempengaruhi penghimpunan deposito berjangka, dimana kenaikan dalam suku bunga akan cenderung meningkatkan

penghimpunan deposito berjangka. Kenaikan suku bunga akan mendorong masyarakat untuk mendepositokan dananya dengan harapan mendapatkan tambahan keuntungan dari besarnya bunga daripada mereka memegang uang tunai yang tidak menghasilkan.

Koefisien total aktiva bank (X_3) sebesar 0,184948 berarti apabila total aktiva bank mengalami peningkatan sebesar Rp 1 miliar, maka deposito berjangka akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,184948 miliar. Kenaikan ini memang tidak begitu besar, namun ini membuktikan bahwa total aktiva juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penempatan deposito berjangka masyarakat meskipun besarnya bunga deposito berjangka masih tetap menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk mendepositokan uangnya. Total aktiva yang dimiliki bank, bagi penabung merupakan salah satu unsur kredibilitas bank yang menjadi pertimbangan bagi calon penabung sebelum memutuskan untuk menanamkan dananya dalam bentuk deposito di bank. Semakin besar total aktiva yang mencerminkan *bank size* makin memberikan keyakinan bagi penabung bahwa dananya akan aman disimpan di bank yang bersangkutan.

Nilai koefisien deposito berjangka periode yang lalu sebesar 0,597312 berarti apabila deposito berjangka periode yang lalu mengalami kenaikan sebesar Rp 1 miliar, maka deposito berjangka akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,597312 miliar. Ini berarti bahwa variabel deposito berjangka periode yang lalu potensial menjelaskan perkembangan deposito berjangka di Indonesia. Sesuai dengan sifat model PAM, didapatkan satu koefisien penyesuaian sebesar $(1-\delta)$ dimana dalam model ini $1-0,597312$ yaitu sama dengan 0,402688. Nilai koefisien

penyesuaian ini menggambarkan bahwa sekitar 40% dari perbedaan antara deposito yang sebenarnya dengan nilai deposito yang diinginkan dihapus dalam waktu satu tahun.

Sedangkan untuk pendapatan nasional (X_1) dan jumlah kantor bank (X_4), keduanya tidak memberikan interpretasi yang valid karena keduanya secara statistik terbukti tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka di Indonesia.

Dapat dilihat disini bahwa dalam fungsi jangka pendek, pendapatan nasional dan jumlah kantor bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap deposito berjangka. Sedangkan tingkat suku bunga deposito, total aktiva bank, dan deposito berjangka periode yang lalu berpengaruh secara signifikan.

5.2.2. Jangka Panjang

Untuk menghasilkan estimasi jangka panjang perlu dicari terlebih dahulu koefisien jangka panjang PAM yang diperoleh dari:

Koefisien jangka panjang = koefisien jangka pendek : koefisien penyesuaian

Koefisien penyesuaian $\delta = 1 - 0,597312 = 0,402688$

Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -207175,18 + 0,126013X_1 + 9836,1188X_2 + 0,459284X_3 + 0,839682X_4$$

Persamaan fungsi jangka panjang ini menunjukkan adanya pembesaran pengaruh perubahan masing-masing variabel independen. Koefisien konstanta sebesar -207175,18 memberikan arti bahwa dalam jangka panjang, jika variabel pendapatan nasional (X_1), tingkat suku bunga deposito (X_2), total aktiva bank (X_3), dan jumlah kantor bank (X_4) tetap, maka deposito berjangka akan turun

sebesar Rp 207175,18 miliar. Koefisien tingkat suku bunga deposito (X_2) sebesar 9836,1188 berarti bahwa dalam jangka panjang kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1% akan menaikkan deposito berjangka sebesar Rp 9836,1188 miliar. Dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang deposito berjangka lebih besar daripada jangka pendek.

Koefisien total aktiva bank (X_3) sebesar 0,459284 memberikan arti bahwa dalam jangka panjang kenaikan total aktiva sebesar Rp 1 miliar akan menaikkan deposito berjangka sebesar Rp 0,459284 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kenaikan total aktiva akan semakin menguatkan keyakinan masyarakat terhadap bank, sehingga masyarakat tidak akan ragu dan khawatir lagi untuk mendepositokan dana mereka di bank.

Koefisien pendapatan nasional (X_1) dan jumlah kantor bank (X_4) tidak valid untuk menganalisis pengaruhnya terhadap deposito berjangka karena kedua variabel tersebut terbukti secara statistik tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito berjangka.

Di antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, ternyata variabel tingkat suku bunga deposito yang paling dominan dalam mempengaruhi deposito berjangka dalam jangka panjang, mengingat koefisiennya yang paling besar dibandingkan koefisien variabel yang lainnya yaitu sebesar 9836,1188. Jadi tingkat suku bunga sangat berperan dalam mempengaruhi deposito berjangka di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1. Kesimpulan

- 1.a. Berdasarkan pengujian secara individual dengan menggunakan uji t, variabel suku bunga, total aktiva bank, dan deposito berjangka periode yang lalu berpengaruh positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis terbukti.
- b. Variabel pendapatan nasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini dikarenakan komposisi pendapatan nasional (PNB) yang tidak melibatkan pendapatan dari warga negara asing. Dalam penelitian ini digunakan keseluruhan deposito yang dihimpun Bank Umum yang berada di Indonesia. Dimana deposito tadi adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh orang yang berdomisili di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sehingga penggunaan pendapatan nasional dalam bentuk produk domestik bruto tidaklah tepat.
- c. Variabel jumlah kantor bank berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Ini karena masyarakat Indonesia kurang begitu memperhatikan jumlah kantor bank sebagai salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk penyimpanan dananya. Selain itu deposito adalah simpanan bagi masyarakat menengah keatas yang sebagian besar berdomisili di kota, jadi meskipun bank mampu menjangkau daerah pedesaan namun

deposito bukanlah segmen pasar yang tepat bagi masyarakat yang berada di desa. Semakin berkembangnya zaman orang tidak harus mengunjungi bank untuk melakukan transaksi keuangan. Bank memberikan kemudahan pelayanan dengan adanya ATM, pengambilan tunai, dan bahkan kini bisa melalui internet dan *handphone*. Dengan demikian variabel jumlah kantor bank tidak dapat dianalisis lebih lanjut.

2. Dalam analisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent, penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan model regresi linear berganda PAM adalah tepat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai $R^2 = 0,995167$. Berarti 99% variasi variabel independen (pendapatan nasional, suku bunga deposito, total aktiva bank, jumlah kantor bank, dan deposito berjangka periode yang lalu) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (deposito berjangka di Indonesia).
3. Hasil uji asumsi Klasik terhadap model regresi menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.
4. Dari hasil estimasi PAM diperoleh elastisitas jangka panjang lebih besar daripada elastisitas jangka pendek. Artinya dalam elastisitas jangka panjang sudah tidak dipengaruhi lagi oleh tingkat deposito berjangka periode yang lalu.

6.2. Implikasi

1. Dengan meningkatnya tingkat deposito berjangka, bank-bank hendaknya lebih efisien dalam mengelola dana yang dihimpun. Selanjutnya perlu adanya usaha untuk menurunkan tingkat bunga tetapi tetap menarik minat menabung masyarakat. Dengan turunnya tingkat bunga, dunia usaha akan bergairah untuk meningkatkan investasi, pendapatan masyarakat akan naik dan pendapatan yang disisihkan untuk menabung akan semakin besar.
2. Dalam menghimpun dana dari masyarakat yang berupa DPK, hendaknya perbankan lebih meningkatkan produk-produk dan pelayanan jasa perbankan sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya.
3. Total aktiva merupakan salah satu faktor pendukung deposito berjangka pada bank umum. Temuan ini memberikan isyarat bahwa dalam memutuskan untuk menanamkan uangnya di bank, penabung di Indonesia masih sangat mempertimbangkan ukuran bank, yang tercermin dari total asset yang dimiliki. Hal ini terutama sekali berlaku bagi kelompok bank swasta dan pemerintah yang memiliki variabilitas total asset yang sangat lebar. Pada bank umum swasta nasional, penilaian kredibilitas bank umumnya terkait dengan total asset yang mencerminkan ukuran bank (*bank size*). Oleh karenanya usaha untuk memperbesar skala bank melalui upaya merger, akuisisi ataupun upaya lainnya akan memberikan dampak positif bagi penghimpunan deposito berjangka masyarakat.

4. Manajemen dana perbankan terkait dengan dua aktivitas, penghimpunan dana dan alokasi dana. Sasaran utama dari manajemen dana perbankan adalah tercapainya tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat likuiditas yang tetap terjaga. Penghimpunan deposito berjangka merupakan salah satu sisi dari manajemen dana perbankan, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat kepada perbankan. Setiap bank perlu berupaya meningkatkan kemampuan dalam penghimpunan dana masyarakat, antara lain dalam bentuk deposito berjangka. Keberhasilan dalam penghimpunan deposito berjangka akan bermuara pada terjaganya likuiditas bank.